

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA MELALUI PEMBENTUKAN BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus pada BUMDes di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus)**



**Oleh:**

**ISTIKOMAH**

**NPM. 1751030146**

**Program Studi : Akuntansi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

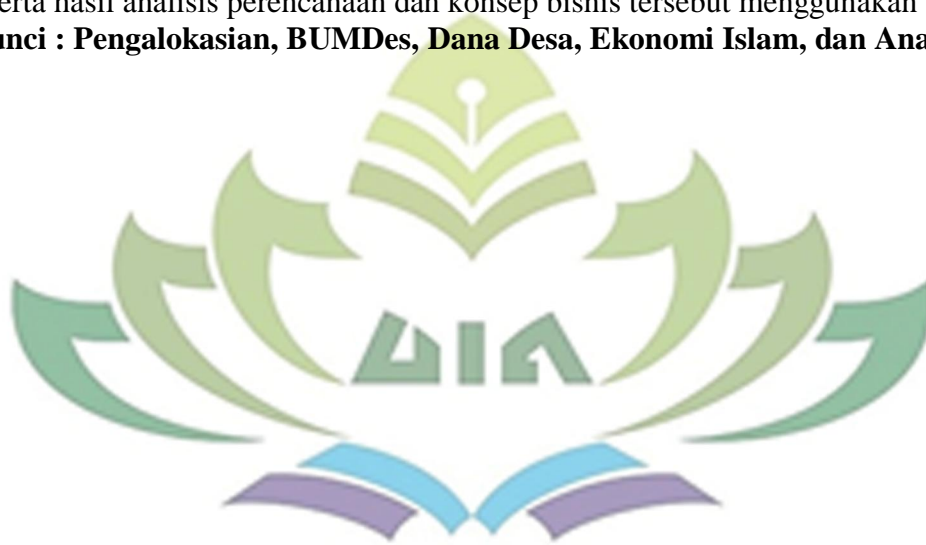
**1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Pengalokasian Dana Desa adalah suatu proses pendistribusian dana desa. Salah satu tujuan pendistribusian dana desa adalah untuk pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh desa dimana memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi desa. Perkembangan ekonomi Islam saat ini berkembang pesat namun hanya pada sektor keuangan saja, belum berkembang di usaha sektor riil. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengalokasian dana desa pada BUMDes dalam perspektif ekonomi Islam pada BUMDes Desa Margomulyo. Hal ini dikarenakan masyarakat pada desa Margomulyo mayoritas beragama muslim dan sifat kegotong royongannya masih kental.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana menggunakan data primer dan data skunder. Data penelitian diperoleh Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan pola etnografik, dimana data dikategorikan atau diklasifikasi disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah peneliti menggambarkan bagaimana pengalokasian dana desa terhadap BUMDes, dimana pembahasannya mencakup proses alokasi, perencanaan dan konsep unit usaha BUMDes secara konvensional dan Syariah yang dikaitkan PSAK, serta hasil analisis perencanaan dan konsep bisnis tersebut menggunakan analisis SWOT.

**Kata Kunci : Pengalokasian, BUMDes, Dana Desa, Ekonomi Islam, dan Analisis SWOT**

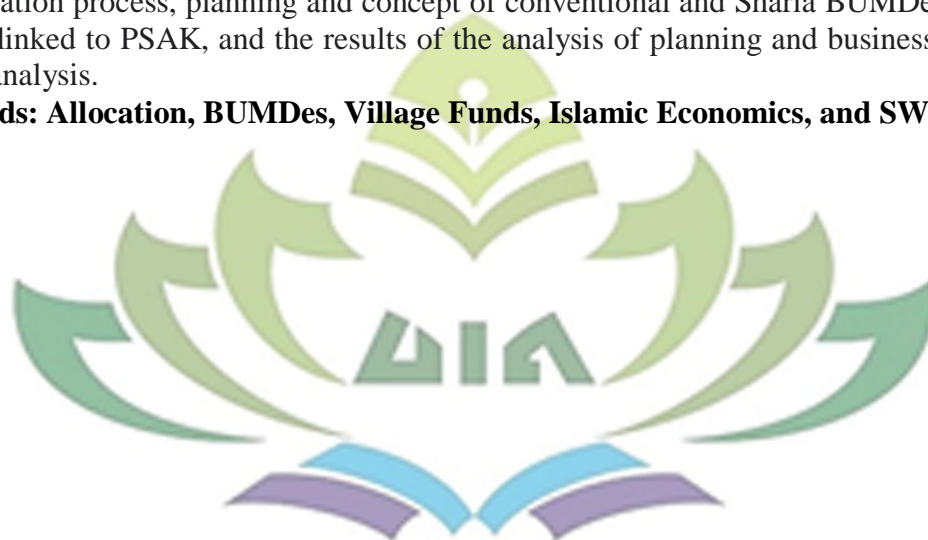


## ABSTRACT

Allocation of Village Funds is a process of distributing village funds. One of the objectives of distributing village funds is for village economic development in order to improve community welfare. BUMDes is one of the institutions established and managed by the village which has the aim of empowering and improving the village economy. The development of the Islamic economy is currently growing rapidly, but only in the financial sector, it has not developed in the real sector business. This study aims to analyze how village funds are allocated to BUMDes in an Islamic economic perspective at BUMDes Margomulyo Village. This is because the majority of people in Margomulyo village are Muslim and their mutual cooperation is still strong.

In this study the authors used qualitative methods, which used primary data and secondary data. The research data were obtained by observation, interview, and documentation study. Furthermore, the data were analyzed using an ethnographic pattern, in which the data were categorized or classified and arranged systematically. The results of this study are that the researchers describe how village funds are allocated to BUMDes, where the discussion includes the allocation process, planning and concept of conventional and Sharia BUMDes business units that are linked to PSAK, and the results of the analysis of planning and business concepts using SWOT analysis.

**Keywords: Allocation, BUMDes, Village Funds, Islamic Economics, and SWOT Analysis**



## SURAT PERNYATAAN

aya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istikomah  
NPM : 1751030146  
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengalokasian Dana Desa melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BUMDes di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, makaanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 20 juni 2021



Istikomah

NPM.1751030146





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul : “ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA MELALUI  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi kasus pada BUMDes Desa Margomulyo Kecamatan  
Semaka Kabupaten Tanggamus)”**

**Nama : Istikomah  
NPM : 1751030146  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Rubhan Masykur, M.Pd  
NIP. 196604021995031001**

**Suhendar, M.S.Ak.Akt  
NIP. 198510302019031004**

**Ketua Jurusan,**

**Any Eliza, M.Ak  
NIP.198308152006042004**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Analisis Pengalokasian Dana Desa melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BUMDes di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus"** disusun oleh, Istikomah, NPM: 1751030146, program studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munasqsyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 28 juni 2021.**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**: Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I**

**Sekretaris**

**: Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

**Penguji I**

**: Madnasir, S.E, M.S.I**

**Penguji II**

**: Dr.H.Rubhan Masykur, M.Pd**

**Penguji III**

**: Suhendar, M.S.Ak., Akt**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP: 19800801 200312 1 001**

## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”*

(Ar-Rad ayat 11)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Sai'in dan Ibu Sukimah, yang aku hormati dan aku banggakan, yang selalu mendukung, menguatkan sepenuh jiwa dan raga, merawat, memotivasi, dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakan agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara/saudariku kakakku tersayang Yuk Inariyati, Kang Sukiran, Kang Suropto, Mbak Parida Wati, Lek Parman, kakak ipar Mbak Sumariyah dan Mbak Neli Sugiyanti, keponakan keponakanku Neli Yanti, Rio Alam, Tomi Aditia, Karunia Pangestuti, Arif Cahyadi, Galang Setiawan, Rita Romahwati, dan Deni Andi Saputra, yang selama ini mendukungku untuk menyelesaikan studiku di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Dilahirkan di Tugupapak, pada tanggal 3 Desember 1998, anak ke-lima dari lima bersaudara pasangan Bapak Sai'in dan Ibu Sukimah.

Riwayat Pendidikan penulis telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tugupapak pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Semaka pada tahun 2014, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 1 Semaka diselesaikan pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan kejenjang Pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Adapun penulis selama aktif dalam perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung ikut aktif dalam organisasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa FEBI sebagai kader UKM-F RISEF pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim, Alhamdulillahirrobbil'alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Pengalokasian Dana Desa melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif islam (Studi Kasus Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)** “. Sebagai salah syarat untuk mendapat gelar di akuntansi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam tank lupa penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan serta doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ruslan Andul Ghofur, M.S.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Akt, Selaku ketua jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Rubhan Masykur, M.Pd, dan Bapak Suhendar, M.S.Ak, Akt, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi data referensi, dan lain-lain.
5. Sahabat seperjuangan akuntansi Syariah C dan seluruh Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang di raih Bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak disebutka satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islmaiyah.

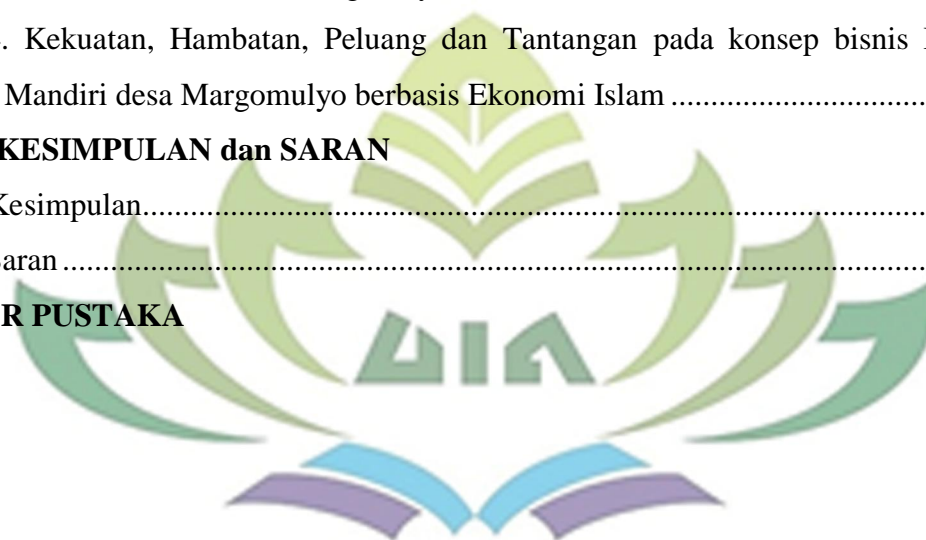
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	2
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kerangka Berfikir.....	7
I. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Otonomi Daerah .....	14
2. Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.....	15
3. Dana Desa .....	18
4. BUMDes.....	20
5. Ekonomi Islam .....	22
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
1. Sejarah Berdirinya BUMDes .....	35
2. Struktur Organisasi.....	36



3. Kegiatan Operasional .....	37
B. Anggaran Perencanaan dan Realisasi .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	40
1. Pengalokasian Dana Desa pada BUMDes desa Margomulyo.....	40
2. Gambaran umum Perencanaan kegiatan Usaha pada BUMDes Tunas Mandiri secara konvensional .....	41
B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap BUMDes .....	42
1. Konsep Ekonomi Islam .....	42
2. Gambaran Syariah pada kegiatan usaha BUMDes Tunas Mandiri .....	46
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah .....	50
4. Kekuatan, Hambatan, Peluang dan Tantangan pada konsep bisnis BUMDes Tunas Mandiri desa Margomulyo berbasis Ekonomi Islam .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN dan SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar BUMDes di Kecamatan Semaka.....	5
Tabel 2 Kajian Peneliti Terdahulu.....	12
Tabel 3 Laporan Realisasi Dana Desa .....	20
Tabel 4 Analisis SWOT .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir .....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi BUMDes .....	38





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	59
Lampiran 2 Hasil Validasi Instrument .....	60
Lampiran 3 Data Mentah.....	63
Lampiran 4 Transkrip Wawancara .....	63
Lampiran 5 Temuan Penelitian .....	65
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian .....	66
Lampiran 7 Data Responden .....	69
Lampiran 8 Profil .....	69
Lampiran 9 Surat Ijin Melakukan Penelitian .....	70
Lampiran 10 Biodata Penulis .....	71



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna judul dari skripsi ini, yaitu : *Analisis Pengelokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BUMDes di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)* Serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat pada proposal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa. Bisa juga merupakan penyelidikan terhadap karangan atau perbuatan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sebab yang ada. Dalam hal penelitian, analisis adalah langkah yang ditempuh setelah data penelitian terkumpul.<sup>1</sup>
2. Pengalokasian, adalah suatu proses pendistribusian, misalnya dana desa kepada masyarakat melalui suatu badan yang dibentuk misalnya bumdes untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup>
4. Pembentukan, menurut KBBI adalah proses, cara perbuatan membentuk, misalnya pembentukan BUMDes demi kemajuan desa.<sup>3</sup>
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup>
6. Perspektif, adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.<sup>5</sup>
7. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dihuni oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi dalam kacamata islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang terapkan dalam etika dan moral Syariah Islam.<sup>6</sup> Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu kehidupan yang lengkap, berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu *Alqur'an, as-sunah, Ijma', dan Qiyas*.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> <http://yenifarikha.blogspot.com/2013/09/pengertian-analisis-penelitian.html?m=1>

<sup>2</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Hal. 7

<sup>3</sup> KBBI

<sup>4</sup> Farida Yustina NFP, Arif Purbantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pusat Penelitian dan Pengembangan*, ( Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia : 2019 ). Hal 4.

<sup>5</sup> Yusuf Qhardawai, Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin, h.1.

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah)

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al Arif, M. Si, *Modul 1 Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. Hal. 5

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana analisis pengalokasian dana desa melalui pembentukan BUMDes dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

Sebagaimana diketahui bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup> Dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu perencanaan pengelolaan dana desa guna tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yaitu dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Usaha pembentukan BUMDes ini, diharapkan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan dapat tercapai karena dalam pengelolaannya selalu mencerminkan asas-asas akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab. Sehingga dana desa yang ada dapat dialokasikan dengan baik atau tidak ada penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **2. Secara Subjektif**

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan pihak pemerintah Desa Margomulyo tentang Badan Usaha Milik Desa dalam kesejahteraan masyarakat Margomulyo. Judul ini memberikan penambahan wawasan baik bagi penulis, pembaca, ataupun Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Margomulyo.
- b. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Karena didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan ini ada hubungannya dengan ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

## **C. Latar Belakang**

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Desa Margomulyo adalah salah satu desa muslim yang berada di kabupaten Tanggamus yang juga menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, sebagai

---

<sup>8</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*. Hal. 12

<sup>9</sup> Andrian Puspawijaya, Ak, Julia Dwi Nurhita Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, ( Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan BKKP dalam rangka diklat teknis substansi Pengelolaan Dana Desa : 2016 ). Hal. 5-6



salah satu contoh adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes / atau BUMDesa Bersama. Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes.<sup>10</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dibentuk oleh desa, melalui musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilaksanakan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembentukan BUMDes dimaksud sebagai upaya Bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Pembentukan BUMDes hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.<sup>11</sup>

Biasanya pada tahap awal pendirian usaha yang menjadi tantangan adalah modal yang cukup, begitu pula dengan BUMDes guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, khusus untuk pendirian BUMDes modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUMDes yaitu dengan penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang telah diserahkan kepada Desa.<sup>12</sup>

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BUMDes ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PAD, maka APB desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah (1) Tidak Langsung, dengan

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020. Hal. 23-24

<sup>11</sup> <https://infobumdes.id/proses-dan-tahapan-pendirian-bumdes/> diakses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 09.45.

<sup>12</sup> <https://www.jogloabang.com/desa/tata-cara-mendirikan-bumdesa> diakses pada tanggal 31 maret 2021, pukul 09.56.

memberikan tranfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa. (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya.<sup>13</sup>

BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergilir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau menggali bagaimana pengalokasian dana desa melalui pembentukan BUMDes dan dengan mengaitkan pada prinsip ekonomi Islam. Maka dari itu perlu melihat perkembangan dari ekonomi Islam pada saat ini. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazimnya dikenal dengan ekonomi Syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa peduli dampak kerugian timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun, ekonomi Islam melakukan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu *Alquran, Al-Hadits dan Ijma'*. Sebagai contoh dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Al- Baqarah Ayat 283 (Tentang Simpanan) serta QS. As-Shaad ayat 24 dan HR Abu Daud (tentang Pinjaman).

Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini masih hanya pada sektor keuangan saja. Namun ekonomi Islam saat ini belum berkembang di usaha sektor Riil. BUMDes merupakan salah satu Lembaga ekonomi yang bergerak dalam sektor Riil karena mayoritas sumber daya yang ada berupa barang dan jasa. Maka menarik jika di lakukan penelitian mengenai perancangan konsep bisnis BUMDes sesuai ekonomi Islam.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Penerapan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen Syariah pada pengelolaan BUMDes.

Di Desa Margomulyo sejak tahun 2016 atau awal pemekaran Desa Margomulyo telah berdiri Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pek) dengan nama “ TUNAS MANDIRI ”, tujuan pembentukan dari BUMPek berdasarkan Peraturan Pemekonan Margomulyo tentang Badan

---

<sup>13</sup> Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta Selatan : UAI Press, 2019). Hal 1-2.

<sup>14</sup> Noni Zulaeha, Putu Sukma Kurniawan, dan Nyoman Putra Yasa, *jurnal ilmiah akuntansi Universitas Pendidikan Granesha Perencanaan Pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip Syariah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ( Studi Kasus di Desa Pengayaman Kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng )*, vol: 10 n0: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614-1930. Hal. 125

Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon). Maka berdasarkan pasal 6 tujuan dari BUMDes antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan asli pekon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat pekon secara keseluruhan dalam rangka pementasan kemiskinan.
3. Menciptakan lapangan kerja, penyediaan, dan jaminan sosial.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah “Budidaya Lebah Lanceng “. <sup>15</sup> Pada tahun berikutnya kegiatan yang dilakukan adalah budidaya ikan lele, namun tidak menghasilkan karena wabah yang menyerang mengakibatkan semua benih mati. Saat ini sedang dilakukan proses perancangan bisnis dari BUMDes Tunas Mandiri Margomulyo. Unit usaha yang sudah dirancang, yaitu unit usaha simpan pinjam dan budidaya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa untuk BUMDes di desa Margomulyo serta merancang konsep bisnis berdasarkan prinsip syariah dalam unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Tunas Mandiri. Penelitian ini juga menganalisis konsep bisnis baru ini dengan menggunakan analisis SWOT dan menentukan strategi yang dapat dilakukan menggunakan analisis matrik SWOT.

Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan oleh para pengurus BUMDes Margomulyo bahwa tujuan pendirian dari BUMDes bukan hanya sebagai fasilitas desa, namun sebagai wadah untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat memajukan desa. Selain itu mengingat banyaknya hasil tani yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk dan memiliki nilai jual, dengan adanya program dari BUMDes misalnya membuka pelatihan usaha bersama, serta pemberian modal kepada masyarakat diharapkan bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Di desa margomulyo BUMDes Sudah berdiri sejak tahun 2016 namun karena terkendala dalam hal permodalan maka tidak dapat berjalan dan sampai sekarang belum mengalami kemajuan, meski sudah ada rencana program yang akan dijalankan untuk kegiatan operasional selanjutnya. <sup>16</sup> Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak desa bahwasanya kurang adanya transparansi dari hasil realisasi BUMDes, contohnya dalam hal laporan keuangan tidak diserahkan ke pihak desa sebagai pertanggung jawaban. Maka dari itu diharapkan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk perbaikan kinerja selanjutnya khususnya untuk pihak BUMDes.

Penulis juga menambahkan BUMDes yang ada di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

Tabel 1

Tentang daftar BUMDes yang ada di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

No	Desa	BUMDes
1	Parda waras	Budidaya terong
2	Way kerap	Budidaya kates

<sup>15</sup> buku Realisasi Badan Usaha Milik Pekon, Pekon Margomulyo Kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus tahun 2016

<sup>16</sup> Hasil wawancara ketua BUMDes desa Margomulyo pada tanggal 29 desember 2020



3	Sedayu	Isi ulang air galon
4	Sukaraja	Budidaya ikan lele
5	Kanoman	BRI Link
6	Sukajaya	Isi ulang air galon
7	Bangun rejo	Isi ulang air galon
8	Tugupapak	Kerajinan batu bata
9	Margomulyo	Budidaya ikan lele

*Sumber : dari arsip kecamatan semaka tahun 2020*

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : ***Analisis Pengalokasian Dana Desa melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada BUMDes di desa Margomulyo kec. Semaka, kab. Tanggamus)***

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk merancang atau membuat rencana pengelolaan keuangan dana desa pekon margomulyo agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, melalui beberapa realisasi program kerja dari BUMDes.
2. Fokus penelitian ini hanya dilakukan di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tidak melibatkan desa lain karena desa tersebut sebagai fokus penelitian.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis pengalokasian dana desa melalui pembentukan BUMDes?
2. Bagaimana Analisis ekonomi Islam terhadap BUMDes?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengalokasian dana desa melalui pembentukan BUMDes.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap BUMDes.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

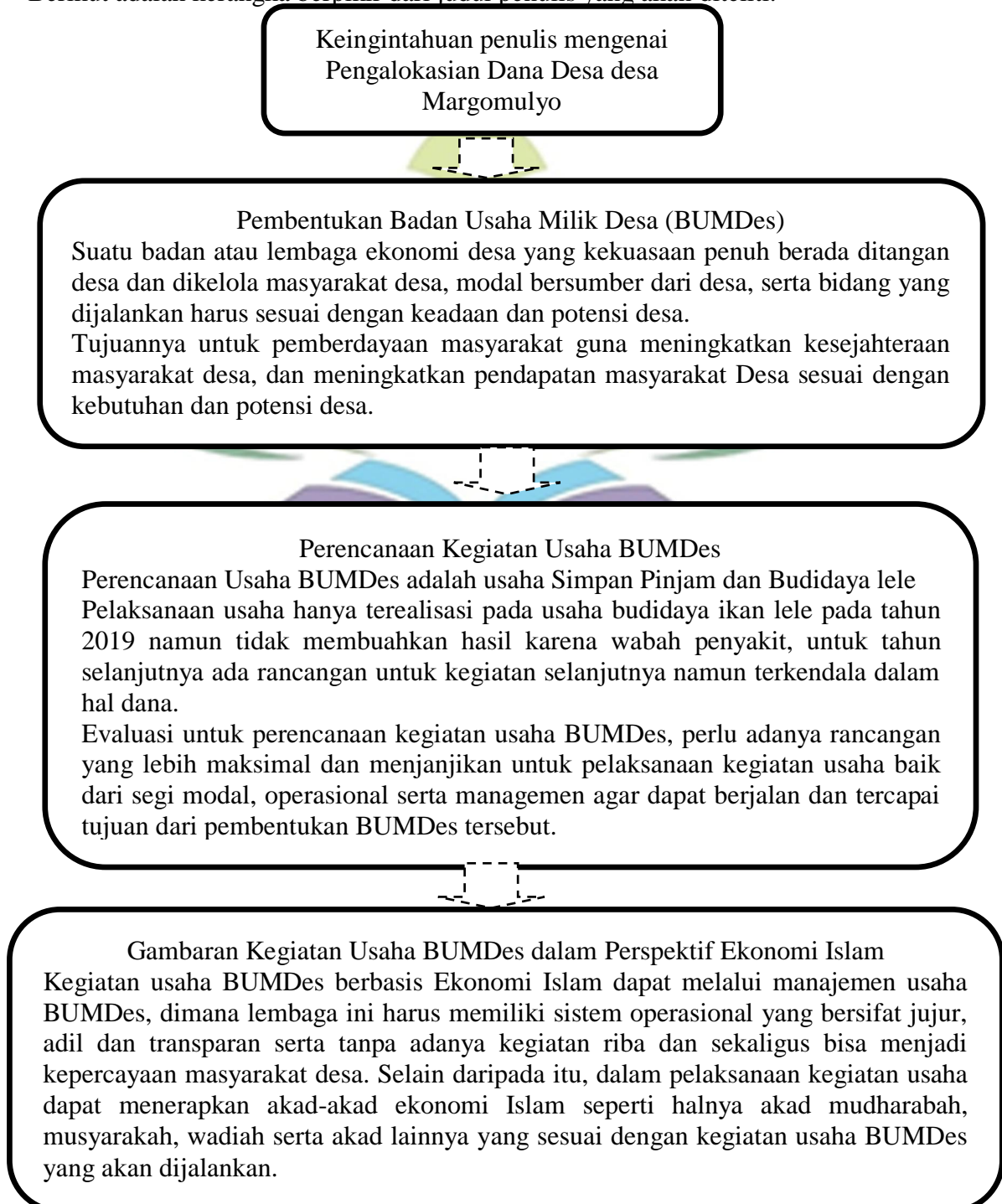
1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa melalui pembentukan BUMDes sesuai perspektif ekonomi Islam.
  - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang BUMDes yang sesuai perspektif Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Organisasi, sebagai masukan bagi manajemen koperasi untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas perkembangan pengalokasian dana desa melalui BUMDes yang pada akhirnya berguna bagi perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu yang akan datang.

- b. Bagi Penulis, menambah wawasan pengetahuan mengenai cara menganalisis tentang Pengalokasian dana desa yang diperoleh dari hasil penelitian.
- c. Bagi Pembaca, memberikan tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.
- d. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait BUMDes.

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dari kerangka berpikir tersebut maka pembaca akan mengetahui alasan dan tujuan melakukan penelitian dengan judul tersebut

Berikut adalah kerangka berpikir dari judul penulis yang akan diteliti.



Pengalokasian Dana Desa adalah suatu proses penyaluran atau mengeluarkan sejumlah dana sesuai dengan anggaran guna memenuhi suatu rencana program atau kebijakan serta peraturan yang selayaknya dijalankan oleh desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa : Proses pembentukan suatu badan atau organisasi yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui organisasi ini dapat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Perencanaan kegiatan usaha BUMDes secara umum adalah rancangan usaha yang dilaksanakan dalam kegiatan operasional BUMDes.

Gambaran kegiatan usaha BUMDes sesuai Prinsip Ekonomi Islam adalah karena mengingat Semakin berkembangnya ekonomi Islam maka semakin banyak pula Lembaga keuangan yang berbasis Islam, namun tidak pada sektor riil yang masih berbasis konvensional seperti halnya melakukan transaksi dengan menerapkan sistem bunga. Dengan melihat kondisi seperti ini perlu adanya suatu rancangan baru yang mengacu pada unsur Islam, terutama pada BUMDes yang merupakan suatu wadah untuk pembangunan desa. Dengan maksud adanya rancangan tersebut dapat mampu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat .

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena, berdasarkan tema penelitian masalahnya masih kurang jelas, sehingga membutuhkan banyak teori untuk memperjelas masalah dan bagaimana penyelesaiannya, selanjutnya karena obyek penelitian yang bersifat nyata / realita peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian.

### **1. Subjek Penelitian.**

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti: (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan utama, yaitu mereka yang terlihat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>18</sup>

Untuk menentukan subyek penelitian supaya dapat menjaring informasi yang memadai agar dapat menemukan suatu model pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka semua informasi akan digali langsung dari pengurus BUMDes pekon Margomulyo dengan menggunakan metode Snow Balling. Dengan cara sebagai berikut: setelah syarat administratif terpenuhi untuk melakukan penelitian, peneliti akan menghubungi kepala desa sebagai key informan melalui dua orang pengurus BUMDes setempat yang telah peneliti kenal baik sebelumnya sebagai guide person. Selanjutnya akan dihubungi

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* , ( Bandung : ALFABETA, 2017), Hal. 3

<sup>18</sup> <https://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/rencana-pendekatan-lingkup-dan-setting.html>

perangkat desa yang mengetahui secara lengkap tentang pelaksanaan Organisasi BUMDes. Perubahan selama ada di lapangan sangat dimungkinkan selaras dengan perkembangan permasalahan yang terjadi.

## 2. *Setting Penelitian,*

*Setting* penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. *Setting* dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Dalam penelitian kualitatif *setting* penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. *Setting* penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitiannya diubah.

*Setting* penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. *Setting* penelitian kualitatif naturalistik mempunyai tiga dimensi yaitu 1) dimensi tempat, 2) dimensi pelaku, 3) dimensi kegiatan.<sup>19</sup>

untuk memudahkan memasuki tempat peneliti maka peneliti mula-mula akan berkenalan secara umum melalui forum rembug desa yang telah ada di desa tersebut melalui *key informant*. Selanjutnya kepada calon subyek penelitian akan diadakan pendekatan secara pribadi melalui *Guide person*. Setelah kehadiran peneliti dirasa telah diterima dengan baik, barulah akan memulai mengumpulkan data yang diperlukan, tentunya dengan tetap membina hubungan baik yang telah terjalin.

## 3. *Data dan Sumber Data*

### a. Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif adalah data lunak yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Salah satu kuncinya adalah peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball sedangkan teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan).<sup>20</sup>

Dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data data keterangan mengenai Alokasi Dana Desa dalam pembentukan dan pelaksanaan BUMDes dalam Perspektif Islam.

### b. Sumber data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

a) Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber seperti kepala desa, pengurus BUMDes atau perangkat desa lainnya yang layaknya dapat mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Prof. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), (Bandung : CV. Alfabeta), 2017, hal. 6

- b) Sumber data skunder adalah sumber data tambahan yang di ambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber lain yang sudah dibuat orang lain, misalnya buku, dokumen, foto dan statistik. Fungsinya sebagai data pelengkap jika informasi dari narasumber kurang jelas dan lengkap, bahkan bisa menjadi utama jika tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa dokumen atau arsip serta laporan kegiatan BUMDes yang telah berjalan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitatif riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: teknik utama digunakan interview, sebagai pendukung digunakan observasi dan analisis dokumen.

- a) Interview (wawancara) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dimana ada ada proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lainnya yang berkaitan dengan organisasi tersebut.
- b) Observasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif, dimana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mencatat fenomena atau kejadian sebenarnya maupun buatan.
- c) Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi di masa silam.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan salah satu dari Teknik analisis data kualitatif, dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat di ambil. Display data (penyajian) data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), grafik, dan bagan. Penarikan kesimpulan, dari hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>23</sup>

Pola analisis data yang akan digunakan adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (*field note*) kemudian akan dilakukan pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil

---

<sup>21</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta : 2014, hal 113

<sup>22</sup> Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong : Ekonomi Syari'ah). Hal. 4-11

<sup>23</sup> <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/> akses pada pukul 19.50 tanggal 1 maret 2021



analisis data tersebut. Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis bila perlu digunakan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

#### **6. Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang sama.
- b. Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- c. Pengecekan oleh subyek penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian dahulu yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti yang berfungsi untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian kita jauh dari kata plagiat.

Berikut penjelasan mengenai beberapa kajian mengenai penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk memperkuat pembahasan judul skripsi.

Table 2.1  
Kajian penelitian terdahulu

N o	Peneliti (Tahun)	Variable	Hasil	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang
1.	Noni Zulaiha, Putu Sukma Kurniawan Nyoman Putra Yasa (2019)	Perencanaan, pengalokasian, dana desa, BUMDes, perspektif, ekonomi Islam	Alokasi dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subject pembangunan.	Penelitian terdahulu: merancang konsep bisnis baru pada BUMDes. Penelitian sekarang: menganalisis konsep Bisnis baru pada BUMDes.
2.	Andi Siti Sri Hutami	Analisis, pengelolaan dan alokasi dana desa (ADD)	Hasil dari penelitian ini pengelolaan ADD sudah berjalan mengikuti sistem namun belum karena ada beberapa faktor yang menghambat.	Penelitian terdahulu: untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa. Penelitian sekarang: untuk mengetahui pengalokasian dana desa terhadap BUMDes.

3.	Abdul Mutolib, Dewangga Nikmatullah, Irwan Effendi, Begem Viantimal, dan Ali Rahmat (2019)	Kontribusi, dana desa, BUMDes	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dana desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam pengembangan BUMDes.	Penelitian terdahulu : menganalisis kontribusi dana desa dalam pengembangan BUMDes. Penelitian sekarang: menganalisis pengalokasian dana desa dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes.
4.	Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, Made Ary Meitriana (2019)	Kewirausahaan sosial, Nilai sosial, civil society, inovasi, dan aktivitas ekonomi .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial.	Penelitian terdahulu: mendeskripsikan peran BUMDes dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian sekarang: mendeskripsikan bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5.	Bambang	Ekonomi Islam, Badan Usaha Milik Desa, Kajian Literatur, SWOT	Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen lembaga dari pemerintah desa, masyarakat, alim ulama, dewan lembaga nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak– pihak yang concern terhadap perkembangan BUMDes dan ekonomi islam.	Penelitian terdahulu: menganalisis implementasi konsep ekonomi islam pada bisnis BUMDes. Penelitian sekarang: untuk menggambarkan bagaimana konsep bisnis BUMDes berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

*Sumber:*<https://www.google.com/search?q=jurnal+akuntansi+syariah+tentang+alokasi+dana+desa+untuk+bundes&oq=jurnal+akun&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433j0.15637j0j4&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>

## B. Kajian Teori

### 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (UU Pemda) : Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Dari keseluruhan definisi tentang otonomi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya pengertian Otonomi Daerah itu mencakup dua aspek penting, yaitu berikut ini

- a. Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.<sup>25</sup> Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan Pemerintah Pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas Pemerintah Daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi akan semakin kuat.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tujuan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk:

---

<sup>24</sup> Rowland B. F. Pasaribu, *Bab 11 Otonomi Daerah*. Hal. 11

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah) akses tanggal 12 november 2020, pk1 13.18

<sup>26</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1596/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed>

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b. Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
- d. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- f. Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu menurut UU 32 tahun 2004 adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan daya saing daerah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.<sup>27</sup>

## 2. Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

### a. Posisi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya :

#### 1) Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A., modul 1 Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, hal 40



penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2) Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

3) Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

4) Pelaksana Teknis Desa

- Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

- Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

- Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5) Pelaksana Kewilayahan

- Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

6) Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

- Administrasi Umum : Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.

- Administrasi Penduduk : Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
- Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
- Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.<sup>28</sup>

Menurut UU No.32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam UU tersebut tidak dengan terperinci mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. UU No. 32 tahun 2004 juga tidak mengatur dengan jelas mekanisme pertanggung jawab Kepala Desa beserta perangkatnya.

Tugas, wewenang, Kewajiban dan Hak kepala desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 dan 15. Dalam Peraturan tersebut yakni pada pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pasal 15 ayat 2 Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.<sup>29</sup>

## **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan

<sup>28</sup> <https://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

<sup>29</sup> Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*,

demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>30</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta Tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan hal yang wajib dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang pesat belakangan ini yang sangat berpengaruh bagi kemapuan individu dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup>

Prinsip pemberdayaan masyarakat terdapat empat bagian yaitu :

- 1) Prinsip kesetaraan, merupakan prinsip utama yang harus dipegang, hubungan kesetaraan antara masyarakat dan Lembaga pemberdayaan masyarakat harus dibangun guna mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling merangkul kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
- 2) Partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat,
- 3) Kesewadayaan dan Kemandirian, prinsip kesewadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Sedangkan kemandirian, mereka yang memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.
- 4) Berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.<sup>32</sup>

Paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pendekatan yang harus digunakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendampingan kepada kelompok masyarakat miskin dengan berbagai kegiatan yang dilakukan.

---

<sup>30</sup> Arif Purbantara, Mujianto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (BP4I : 2019), Hal. 4

<sup>31</sup> Arsyad, *Modul pemberdayaan masyarakat* (Bandung : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan sumber daya air dan kontruksi, 2017). Hal 2

<sup>32</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/> diakses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 17.15

Bentuk pendampingan berupa fasilitasi, mediasi, dan advokasi yang sebaiknya dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat setempat. Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses kegiatan penanggulangan kemiskinan. Langkah intervensi pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin produktif potensial ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin beserta kelembagaannya dalam pengelolaan sumber-sumber daya, dengan pendekatan community based development menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>33</sup>

Contoh pemberdayaan masyarakat desa, desa sering diidentikan dengan daerah yang tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Padahal, potensi sumber daya alam didesa begitu melimpah dan dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni agar bisa dioptimalkan dengan baik. Bukan mereka tak mampu tetapi seringkali kemampuan mereka terbatas menjadikan mereka tidak mampu mengolah kekayaan alam disekitar menjadi optimal dan juga mensejahterakan masyarakat.

Berikut adalah beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu membina mereka untuk bersaing di era global ini :

- 1) Program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, yang tujuannya untuk membuat masyarakat desa mandiri dan juga sejahtera. Seperti halnya pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan lain sebagainya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang pertanian, seperti pelatihan dan pembinaan untuk petani (yang dulu membajak sawah menggunakan tenaga sapi atau kerbau sekarang menggunakan traktor), pengetahuan tentang pengairan sawah, pendistribusian hasil tani,
- 3) Pemberdayaan dalam bidang Kesehatan, seperti peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan penyuluhan program Kesehatan.
- 4) Pemberdayaan dalam bidang Pendidikan, seperti peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, tenaga pengajar yang memadai.
- 5) Pemberdayaan dalam bidang agama, seperti pemberian insentif untuk guru ngaji dengan layak dan sesuai, pemberian fasilitas yang mendukung kegiatan pengajian dan adanya pelatihan bagi guru atau anak-anak hafidz untuk termotivasi menjadi seorang hafidz, renovasi tempat ibadah, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dengan berpegang

---

<sup>33</sup> Ir. Hendrawati Hamid, M.Si., *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, ( Makasar : DE LA Macca , 2018), hal 34

<sup>34</sup> <https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa/> diakses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 17.35

tiga prinsip utama, ketiga prinsip utama itu adalah prinsip *Ukhuwah*, prinsip *Ta'awun* dan Prinsip persamaan derajat.<sup>35</sup>

### 3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut : UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No. 8 tentang perubahan kedua atas PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa  
Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Dana desa dari APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan rehabilitasi daerah kabupaten/ kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima kab/kota (minimal 10 % dari dana desa bagi hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>37</sup>

Keuangan desa menurut undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dengan periode 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ulfi Putra Sany, Jurnal ilmu dakwah : *Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an*, volume 39 no. 1 (2019) hal 34.

<sup>36</sup> <https://klc.kemenkeu.go.id/apakah-dana-desa-itu/> diakses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 20.00

<sup>37</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku saku Dana Desa

<sup>38</sup> Andrian Puspawiajya, Ak, Julia Dwi Nuritha Siregar, *pengelolaan keuangan desa*, (BPKP : 2016), Hal



Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan tanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggung jawaban keuangan desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa, untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.<sup>39</sup>

Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total dana desa dimana setiap dana desa mendapatkan jumlah yang merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.<sup>40</sup>

Dana desa pekon Margomulyo berkisar 1 M, yang tidak hanya bersumber dari APBN namun berasal dari APBD daerah dan juga Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. Dana desa digunakan untuk kegiatan operasional pekon yaitu kegiatan pemerintah pekon dengan pemberian gaji untuk pengurus pekon, dana Kesehatan dan lain sebagainya, dan juga untuk kegiatan pembangunan yang berfisik dan non fisik seperti pembangunan jalan, pembuatan Gedung, perbaikan sekolah, pelatihan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Di pekon Margomulyo dana untuk pembangunan memiliki persentase sekitar 70% yang tidak bersifat permanen tergantung kebutuhan pembangunan, sisanya untuk kegiatan operasional pemerintahan. Penyertaan atau alokasi dana desa untuk BUMDes tidak ada persentase sesuai dengan kemampuan desa untuk pemberian modal. Untuk periode ini penghasilan asli desa belum ada, karena adanya pandemi covid 19, yang sebelumnya ada dana untuk penyertaan modal ke badan usaha yang di miliki desa namun untuk tahun ini belum ada. Dana desa digunakan untuk kegiatan sosial yaitu memberikan

---

<sup>39</sup> <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>

<sup>40</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf&ved=2ahUKEwj2xKGPYtrvAhWs73MBHbd\\_CQYQFjABegQIAxAG&usg=AOvVaw2XMIpVPFjsRkPa3PYcV3EF](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf&ved=2ahUKEwj2xKGPYtrvAhWs73MBHbd_CQYQFjABegQIAxAG&usg=AOvVaw2XMIpVPFjsRkPa3PYcV3EF) diakses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 20.35.

bantuan BLT Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak covid dan juga untuk perbaikan jalan rusak.<sup>41</sup>

Berikut adalah salah satu contoh gambaran Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tahun 2020:

Tabel. 2.1 laporan realisasi anggaran APB desa

Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020				
	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Desa		-	-	-
Pendapatan Transfer		1.200.000.000,00	1.190.500.000,00	9.500.000,00
Dana Desa		560.000.000,00	555.700.000,00	4.300.000,00
Bagi hasil pajak dan retribusi		130.550.000,00	130.550.000,00	,00
Alokasi Dana Desa		509.450.000,00	509.450.000,00	,00
Pendapatan Lain-lain		5.950.000,00	6.550.500,00	600.500,00
Jumlah Pendapatan		<u>1.205.950.000,00</u>	<u>1.202.250.000,00</u>	<u>14.400.500,00</u>
<b>Belanja</b>				
Bidang penyelenggaraan PemDes		345.255.500,00	335.405.700,00	9.849.800,00
Bidang Pelaksanaan Pemabangunan Desa		146.276.000,00	140.225.000,00	6.051.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		90.600.550,00	78.450.000,00	12.150.550,00
Bidang Sosial		650.550.455,00	645.450.500,00	5.099.955,00
Jumlah Belanja		<u>1.232.682.505,00</u>	<u>1.199.531.200,00</u>	<u>33.151.305,00</u>
Surplus / Defisit		<u>(26.732.510,00)</u>	<u>2.718.800,00</u>	<u>(18.750.805,00)</u>

Sumber : laporan keuangan desa margomulyo tahun 2020

#### 4. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolannya<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hasil wawancara PJ dan Kepala Urusan Pekon Margomulyo, pada tanggal 2 januari 2021

<sup>42</sup> Farida Yustina NFP, Arif Purbantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)*, ( Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia : 2019 ). Hal. 2-3

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa, potensi ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia, penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan, dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.<sup>43</sup>

BUMDes dibentuk dengan berbagai ragam tujuan seperti yang tercantum pada Permendesa No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Secara rinci tentang kedua landasan BUMDes adalah :

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 213 ayat (1) “ desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa “
- b. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa,

Pasal 78 :

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang -undangan.
- 3) Bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum.

Pasal 79 :

- 1) Usaha yang harus dikelola oleh pemerintah desa
- 2) Permodalan BUMDes dapat berasal dari PEMDES, Tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.

Pasal 80 :

- 1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> <https://infobumdes.id/proses-dan-tahapan-pendirian-bumdes/> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pukul 21.31

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika sistem Pembangunan ( PKDSP ) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (PP RPDN : 2007). Hal. 9-10

Langkah pengajuan atau pendirian BUMDes :

- a. Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat
- b. Pembentukan Tim persiapan pembentukan BUMDes
- c. Rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha
- d. Sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha kepada masyarakat.
- e. Penyusunan Anggaran /Anggaran Rumah Tangga dan Rancangan peraturan desa
- f. Persiapan Musyawarah Desa
- g. Musyawarah Pembentukan BUMDes<sup>45</sup>

Prinsip umum pengelolaan BUMDes :

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntanble, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base dan self help* yang dijalankan secara professional.
- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes.
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas.
- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat des aitu sendiri, tetapi juga masyarakat dan cakupan yang lebih luas .
- e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal. a) masyarakat desa yang yang penghasilannya tergolong rendah, c) masyrakat yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupna sendirinya, d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahaya scenderung terpuruk dalm sistem pemasaran yang memberikan kesempatan pemilik modal untuk menekan harga.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi upaya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> <https://www.jogloabang.com/desa/tata-cara-mendirikan-bumdesa>

<sup>46</sup> Ibid 12-13

## 5. Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses maksimalisasi produksi maupun maksimalisasi utilitas individu.

Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (habluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, pertama, aqidah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Dengan demikian, harus menjadi keimanan seorang muslim ketika melakukan berbagai aktivitas di muka bumi. Oleh karena semuanya semata-mata untuk mendapatkan keridaan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Kedua syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Ketiga akhlaq, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan Syariah.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud Ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Alquran, as-Sunah, Ijma', dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam.

Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>48</sup>

### b. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury (1986) sebagai berikut:

- 1) Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

---

<sup>47</sup> Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M, *Mengenal Ekonomi Syariah*, ( Jawa Timur : Surya Pena Gemilang, 2011), Hal. 1

<sup>48</sup> M. Nur Rianto Al Arif, M.Si., *Modul 1 Ekonomi Islam*, Hal 5



- 2) Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.
- 3) Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat.<sup>49</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut :

- 1) Pelarangan atas riba (*abolition of riba*) di dalam perekonomian.
- 2) Penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.
- 3) Pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan riil dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.
- 4) Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat.

Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung maysir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas keridaan kedua belah pihak.
- 2) Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan.
- 3) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maysir, gharar, dan riba sebab dalam

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 6

transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.

- 4) Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.<sup>50</sup>

Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang Allah turunkan dan berikan kepada manusia sebagai petunjuk. Petunjuk tersebut sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia di segala sektor. Hal ini karena memang islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah terhadap Allah saja melainkan seluruh aspek manusia mulai dari hukum, pemerintahan, ekonomi, pernikahan, dan lain sebagainya.

Berikut adalah penjelasan mengenai dasar ekonomi islam berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, agar umat islam dapat menjalankannya di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

### c. Ketauhidan Dasar Utama Ekonomi Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

*“Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” (QS Saba : 24)<sup>51</sup>*

Dari ayat di atas telah Allah jelaskan bahwa sesungguhnya rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan nikmat dari Allah SWT. Allah memberikannya dari sunnatullah yang Allah tetapkan di langit dan bumi. Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia di muka bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya bantuan dan ketetapan dari Allah SWT.

Hal ini dapat kita hayati dari hal-hal berikut ini:

- 1) Manusia tidak akan bisa panen jika tanpa ada keteraturan musim hujan dan musim panas yang Allah tetapkan.
- 2) Manusia tidak akan bisa memakan dan meminum sesuai kebutuhannya jika Allah tidak menurunkan sunnatullah di alam raya ini.
- 3) Manusia bisa melaksanakan bisnisnya dengan bahan baku yang didapat dari ciptaan Allah, tidak ada yang bisa manusia buat kecuali hanya mengkreasikan
- 4) Perputaran uang dan harta manusia tidak akan abadi, sedangkan rezeki yang Allah nilai bukan hanya harta melainkan kesehatan, kasih sayang, dsb

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa dasar ekonomi islam adalah ketundukkan dan ketaatan kepada Allah SWT pelaksanaan nilai, Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Ekonomi islam

<sup>50</sup> Ibid 5-7

<sup>51</sup> AL Hidayah Al- Qur'an tafsir perkata tajwid dan kode angka ( Depatemen Agama RI : KALIM ) surah saba'. Hal 432

didasarkan pada ketauhidan. Seluruh aktivitas ekonomi umat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa dilakukan jika Allah tidak menetapkan Sunnatullahnya.<sup>52</sup>

**d. Aktivitas Ekonomi adalah bagian dari ibadah**

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt :

QS. Al-Baqarah: 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

*“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa ”<sup>53</sup>*

Aqidah adalah landasan dasar utama dan pertama dari ekonomi Islam. Selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpedoman kepada syari'at. Setiap implementasi syari'at harus berlandaskan pada aqidah, apabila tidak maka amalan tersebut sia-sia.

**e. Hak memiliki harta**

Konsep pemilikan dalam Islam didasarkan pada beberapa pandangan:

- 1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relatif.
- 2) Manusia hanyalah menjalankan amanah dari Allah SWT untuk memanfaatkan harta sebaik-baiknya dan untuk kemashlahatan manusia.
- 3) Harta dipandang sebagai perhiasan hidup dan manusia disuruh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
- 4) Harta benda harus diperoleh manusia dengan jalan yang halal.
- 5) Di samping memiliki fungsi pribadi, harta dalam Islam juga memiliki fungsi social.<sup>54</sup>

QS. An-Nisaa': 29

<sup>52</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam>

<sup>53</sup> Ibid Al- Qur'an terjemah hal. 28

<sup>54</sup> Muhammad Ari, *Filsafat Ekonomi Islam*, hal 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>55</sup>

Teori Perwakilan/Amanah:

- 1) Pemilik sebenarnya ( hakiki ) adalah Allah Swt
- 2) Manusia mendapat amanah dari pemilik sebenarnya.
- 3) Wakil/Yang mendapat amanah harus mengikuti aturan dari yang mewakilkan/memberi amanah.
- 4) Kalau tidak tunduk pada aturan, maka yang mewakilkan/pemberi amanah akan menegur, memperingatkan bahkan bisa mencabut wewenangnya sebagai wakil.

#### f. Landasan Akuntansi

QS. Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis

<sup>55</sup> Ibid. Surah An-nisa hal 84



itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnyanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.<sup>56</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut, secara tersirat menjelaskan bahwa praktik akuntansi, seperti; Catatan, Bukti Pemeriksaan, Independensi keputusan pemeriksa sesuai dengan syari’at Islam.

Sifat utama yang harus dimiliki setiap muslim dalam berekonomi:

- 1) *Shiddiq*  
Memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Salah satu bentuk kejujuran itu adalah, jika berhutang Rp. 100.000, segera ditulis, dipersaksikan dan tidak ada niat untuk membohongi dengan tidak mau melunasinya.
- 2) *Fathana*  
Memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko telah dihitung. Dalam berhutang misalnya, hendaknya memperhitungkan kemampuan dirinya. Jangan sampai berhutang hanya untuk berfoya-foya / hal-hal yang tidak bermanfaat.
- 3) *Amanah*  
Menjaga dengan ketat prinsip kepercayaan, yaitu dengan mempercayai orang lain dan menjaga kepercayaan orang lain. Dalam berhutang misalnya, harus berniat untuk segera melunasinya ketika mampu melunasinya.
- 4) *Tabligh*  
Mendorong prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), dalam bermu’amalah. Salah satu bentuknya adalah selalu menulis surat resmi dalam setiap berakad. Dan menunjuk dua saksi agar kalau yang satu lupa, yang lain dapat mengingatkan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ibid Surah Al-Baqarah. Hal 49

<sup>57</sup> <https://ourislamiceconomic.wordpress.com/2013/05/28/ayat-dan-hadis-ekonomi/> diakses 20/11/2020



## g. Landasan Manajemen

QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan “. <sup>58</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman di anjurkan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun dan dalam hal apapun, jangan karena kebencian kita mendorong untuk berlaku tidak adil atau semena-mena. Sikap adil merupakan salah satu cara untuk lebih dekat kepada takwa, maka bertakwalah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan.

## h. Landasan Bertransaksi

### 1) Penghapusan Riba

Sejak zaman dahulu riba telah menjadi salah satu hal yang banyak diperdebatkan terutama kaum muslim. Sebenarnya istilah riba yang dikenal dalam islam juga dikenal oleh bangsa lain pada zaman sebelum islam (baca perkembangan islam). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan riba dan bagaimana hukum riba menurut islam. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini.

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan disini bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. <sup>59</sup>

Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada saat itu, yang secara luas dapat menimbulkan dampak kerugian pada komunitasnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *al-Mudatstsir* (74) ayat 43-44 yaitu:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

"Mereka menjawab: "Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." <sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ibid Surah Al-Maidah, hal. 109

<sup>59</sup> <https://www.kompasiana.com/tribuana/5c7a087943322f6c721070a2/riba-dalam-pandangan-ekonomi-islam>. Diakses pada tanggal 20/11/2020 pukul 09.05

<sup>60</sup> Al-Qur'an Tafsir Qs. Mudassir ayat 34-44, hal. 577

Maksud dari ayat tersebut adalah umat islam diwajibkan menafkahkan sebagian dari harta kita untuk fakir Miskin melalui zakat. Meskipun perintah pelaksanaannya bersifat wajib, namun umat islam diminta ikhlas dan sukarela mengeluarkan zakat untuk ikut campur tangan dan peduli dalam mengurangi penderitaan kelompok tertentu.

Menafkahkan sebagian dari harta dapat dilakukan dengan bentuk pemberian sedekah. Jika bentuk tersebut terasa berat, maka dapat dilakukan melalui pinjaman dengan tidak memungut atau meminta kelebihan dari nilai pokok yang telah dipinjamkan.

Apabila pinjaman sudah masuk jatuh tempo mengembalikan pihak peminjam tidak boleh meminta tambahan dan juga sebaliknya pihak yang meminjam harus memberikan kepastian waktu, jika ia memang mampu untuk mengembalikannya.

Jika pemberian utang disertai dengan tambahan pengembalian, maka dilarang termasuk kategori riba. Dalam Al-Qur'an, larangan riba diturunkan melalui empat tahapan. *Pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surah *ar-Rum* (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."*<sup>61</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang riba yang tidak memberikan tambahan kepada harta. Islam tidak hanya diam saja dengan keberadaan riba yang semakin meluas yang tidak sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.

*Kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-Nya dalam surah *an-Nisa* ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾  
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا ۖ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba', padahal sesungguhnya mereka telah dilarangi daripadanya dan karena*

<sup>61</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*, hal 403

*mereka memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*<sup>62</sup>

## 2) Pelembagaan Zakat

Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan secara yang lebih baik, yang akan menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial di antara kelompok kaya (Muzakki) dan kelompok miskin (Mustahik). Zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintah, karena kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan karena ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi masyarakat dalam suatu negara. Dengan pelembagaan seperti ini maka efektivitas maupun optimalisasi pengelolaan zakat dapat terjamin.<sup>63</sup>

Anjuran untuk menunaikan zakat salah satunya dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."* QS. At-Taubah ayat 103.<sup>64</sup>

Dari penjelasan ayat diatas maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan dan menyucikan diri agar jika kita menjadi tentram.

## 3) Pelarangan Gharar

Ajaran islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar, karena termasuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau belum jelas. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu dalam sebuah transaksi sehingga bersifat spekulatif, hal ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Misalnya, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih dalam bentuk janin. Gharar akan menciptakan instabilitas dari kerapuhan dalam perekonomian, baik jangka pendek atau Panjang.

Larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung gharar sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di bawah ini :

---

<sup>62</sup> Ibid hal 104

<sup>63</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, (Depok : RajaGrafindo Persada). Hal 71-73

<sup>64</sup> <https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian harta benda lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”. QS. Al-Baqarah 188

Contoh transaksi yang mengandung gharar terdapat dalam hadist Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya beliau berkata :

الْحَبْلَةُ حَبْلٌ بَّيْعٌ عَنْ رَسُولٍ إِلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَهَى

“Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual anak dari anak yang masih berada dalam perut unta” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari penjelasan kedua ayat di atas kita sebagai orang muslim dilarang untuk melakukan transaksi yang sifatnya belum jelas atau tidak ada kepastian, karena dikhawatirkan adanya salah satu pihak yang terdzolimi atau mendzolimi.<sup>65</sup>

#### 4) Pelarangan yang Haram

Dalam dekonomi islam segala sesuatu yang dilakukan harus *halalan toyyiban*, yaitu benar secara hukum islam dan baik dari perspektif dan nilai dan moralitas islam. Dalam hal ini islam mengharamkan setiap transaksi karena tiga hal. *Pertama*, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur dan potensi ketidakadilan (menzalimi atau terzalimi), seperti perjudian, pencurian, dsb. *Kedua*, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis, yaitu berusaha menyembunyikan informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. *Ketiga*, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minuman yang memabukkan, dsb.

Larangan yang haram dalam islam salah satunya adalah khamr (minuman keras) sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. katakanlah: kepada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan Ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. QS. Al-Baqarah ayat 219.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> di akses pada pukul 13.39 tanggal 3 maret 2021

<sup>66</sup> <https://tafsirweb.com/851-quran-surat-al-baqarah-ayat-219.html>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat dan terhindar dari mudharat, dan pada akhirnya dapat merugikan kita sendiri.

#### **i. Sistem Ekonomi Islam**

Sistem adalah organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, dan juga saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan pemahaman tersebut maka sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Jadi yang dimaksud sistem ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi yang pelaksanaannya berlandaskan atau berpedoman pada aturan dan nilai-nilai islam. Sumber dari nilai keseluruhan tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' dan Qiyas.<sup>67</sup>

Sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/pengusaha dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan konsumsi yang dihasilkan dengan patuh atau menerapkan peraturan perundang-undangan islam (sunnatullah).

Kebaikan dalam sistem ekonomi islam adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai-nilai yang tertanam sangatlah kuat, sehingga perilaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya, tidak akan pernah melakukan aktivitas yang menyebabkan pencapaian perekonomian dengan cara yang salah (tipu daya).
- 2) Sangatlah memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memiliki Batasan-batasan yang diatur dalam syariat islam. Maksudnya kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk menjaga titipan-Nya.
- 3) Negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, di mana negara salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.
- 4) Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak dan sadaqah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan sistem ini tidak akan terjadi kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat.
- 5) Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras, dalam setiap ajaran agama menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Berbagai praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu untuk bekerja keras seperti zakat dan haji merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum berkecukupan.<sup>68</sup>

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu Tauhid, Syari'ah dan Akhlak. Pengamalan Syariah dan Akhlak merupakan refleksi dari Tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak

---

2021 <sup>67</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/247/2/062411026\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/247/2/062411026_Bab2.pdf) di akses pada pukul 21.31 tanggal 2 maret

<sup>68</sup> Nur Rianto Al Arif, *filosofi dasar ekonomi islam*, ESPA4528/MODUL 1, hal 41-44



terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market disiplin yang baik.

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut nilai-nilai, norma dan ajaran Islam sebagai unsur fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Maka akan terjalin keselarasan dan keseimbangan antara individu, kelompok dengan kebijakan Lembaga sosial ekonomi masyarakat dan negara dengan bentuk kebijakan yang berazaskan nilai-nilai keimanan. Sehingga terjadi suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat di dunia dan diakhirat.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Muhamad Takhim, *sistem ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat* , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, hal 5-11

## DAFTAR PUSTAKA

- NFP, f. y. (2019). *Modul KKN Tematik desa membangun badan usaha milik desa (BUMDes) pusat penelitian dan pengembangan.*(kementrian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi republik indonesia) . 23.
- Metodology penelitian keteknikan : *Perencanaan Penelitian /Rancangan Penelitian* (2011/2012)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Qhardawai, Yusuf. *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*, Cet II Bairut Libanon, 1408 H / 1998 terjemahan Didin Hafifudin.
- Rianto, M. Nur, Al Arif, M. Si, *Modul 1 Filosofi Dasar Ekonomi Islam*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa*.
- Puspawijaya, A. A. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BKKP dalam rangka diklat teknis subtransi pengelolaan dana desa .*
- Desa, P. M. (2020). *Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2020.*
- Noni Zulaeha, P. S. (2019). *Perencanaan Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Prinsip Syariah Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi kasus di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) . Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pendidikan Granesha , vol: 10 no: 2 e-ISSN: 2614-1930.*
- Djaenuri, Aries, *modul 1 Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*.
- Nadir, Sakinah. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013.
- Purbantara, Arif , Mujiyanto. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (BP4I : 2019).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12)
- Hamid, Ir. Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: DE LA Macca, 2018)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*
- Puspawiajya, Ak, Andrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. *pengelolaan keuangan desa*, (BPKP : 2016).
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas  
Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (PP RPDN : 2007).

Churiyah, Hj. Madziatul. *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, 2011).

AL Hidayah Al- Qur'an tafsir perkata tajwid dan kode angka ( Depatemen Agama RI : KALIM )

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/dasar-ekonomi-islam> diakses pada tanggal 19 nov 2020

Ari, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*.  
<https://ourislamiceconomic.wordpress.com/2013/05/28/ayat-dan-hadis-ekonomi/> diakses tanggal 20/11/2020

Mardanis, *makalah Gadai Syariah (rahn) dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*.  
 NurHidayati, Ika Novi. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Azarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

Riyadi, Fuad. *Sistem dan Strategi pengupahan perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015.

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, ( Bandung : ALFABETA, 2017).  
<https://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/rencana-pendekatan-lingkup-dan-setting.html>

Peraturan Pemekonan Margomulyo Nomor 1 tahun 2016 *tentang Badan Usaha Milik Pekon bab V pendirian BUMPekon*.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Pekon Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2017 *tentang bab I pasal 1 Pendirian, Nama, Tempat, Kedudukan, dan Daerah Kerja, bab II pasal 2 visi dan misi , bab III pasal 3 Bentuk dan Fungsi*.

Ibid *bab VI Hak dan Kewajiban Pengurus*

Berita acara musyawarah, 07 januari 2016, *tentang pembentukan BUMDes Pekon Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus*.

Berita acara *tentang reorganisasi kepengurusan BUMDes "Tunas Mandiri" Pekon Margomulyo no.107 20-21/MRG/BUMDes/2018*

Buku Realisasi BUMDes Pekon Margomulyo kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Hasil wawancara ketua BUMDes Desa Margomulyo pada tanggal 29 Desember 2020

Hasil wawancara Kepala Desa dan Kepala Urusan Desa Margomulyo pada tanggal 2 januari 2021

Nugraheni, Farida, *metode kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta : 2014)

Ryana, Ryski kawasati. Teknik pengumpulan data metode kualitatif (Sekolah Tinggi Agama IslamNegeri (STAIN) Sorong : Ekonomi Syariah).

Takhim, Muhamad. *sistem ekonomi islam dan kesejahteraan masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi,

<https://tafsirweb.com/851-quran-surat-al-baqarah-ayat-219.html>

<https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> di akses pada pukul 13.39 tgl 3 maret 2021

[http://eprints.walisongo.ac.id/247/2/062411026\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/247/2/062411026_Bab2.pdf) di akses pada pukul 21.31 tanggal 2

maret 2021

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, (Depok : RajaGrafindo Persada).

<https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Al-Qur'an Tafsir Qs. Mudassir ayat 34-44

<https://tafsirweb.com/7403-quran-surat-ar-rum-ayat-39.html>

<https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/> akses pada pukul 19.50 tanggal 1 maret 2021

<http://yenifarikha.blogspot.com/2013/09/pengertian-analisis-penelitian.html?m=1>

<https://infobumdes.id/proses-dan-tahapan-pendirian-bumdes/>

<https://www.jogloabang.com/desa/tata-cara-mendirikan-bumdesa>

<https://www.google.com/search?q=jurnal+akuntansi+syariah+tentang+alokasi+dana+desa+untuk+bumdes&oq=jurnal+akun&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433j0.15637j0j4&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/>

<https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa/>

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf&ved=2ahUKEwj2xKGPYtrvAhWs73MBHbd\\_CQYQFjABegQIAxAG&usg=AOvVaw2XMIPvPFjsRkPa3PYcV3EF](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf&ved=2ahUKEwj2xKGPYtrvAhWs73MBHbd_CQYQFjABegQIAxAG&usg=AOvVaw2XMIPvPFjsRkPa3PYcV3EF)

<https://klc.kemenkeu.go.id/apakah-dana-desa-itu/>

Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* . Jakarta : UAI Press.

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas>

IAI. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta : IAI.

<http://aniesakuntan.blogspot.com/2020/07/ringkasan-psak-59-akuntansi-perbankan.html?m=1>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html>

<https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/>

<https://nasehatsae.wordpress.com/2017/12/18/wadiah-pengertian-landasan-rukun-syarat-macam-macam-aplikasi-di-bank/>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx>